

Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan

Novegya Ratih Primandari^{1*}

¹ Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Baturaja, Sumatera Selatan

* Email: novegya.iesp@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze effect of economic growth, inflation and Unemployment on the Rate of Poverty in the Province of South Sumatera. This research used secondary data in the form of time series data from 2001-2017. The method used quantitative approach by applying a linear regression model with OLS estimation Ordinary Least Square (OLS) method. The results of this study indicate that partially and simultaneously Economic Growth, Inflation and Unemployment have a significant effect on the Poverty Rate in the Province of South Sumatera.

Keywords: Economic Growth, Inflation, Unemployment, Rate of Poverty

JEL Classification: E00, E02

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering kali dikaitkan ketidakmampuan di sisi ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan secara absolut diukur berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup penting dan sangat perlu untuk diantisipasi. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah bisa dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinannya. Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan metode analisis lintas negara menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat turunnya tingkat kemiskinan (Tambunan, 2011).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya adalah pengendalian laju inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus menerus. Jika yang naik hanya satu barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain. Dengan meningkatnya tingkat inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya pendapatan masyarakat yang rendah. Keadaan ini akan menjadi lebih parah lagi apabila diikuti pula dengan tingginya tingkat pengangguran. Saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial dan politik. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, baik berupa perampokan, pencurian maupun perdagangan ilegal. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi, minimal kebutuhan pokok.

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi karena memiliki angka kemiskinan diatas nasional.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan per Maret 2017

Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase (%)
Maret 2009	1167,87	16,28
Juli 2009	1130,00	15,68
Maret 2010	1125,73	15,47
Juli 2010	1105,00	14,80
Maret 2011	1077,67	14,24
September 2011	1063,81	13,95
Maret 2012	1059,13	13,78
September 2012	1043,62	13,48
Maret 2013	1110,53	14,24
September 2013	1104,57	14,06
Maret 2014	1100,83	13,91
September 2014	1145,63	13,62
Maret 2015	1112,53	14,25
September 2015	1101,19	13,77
Maret 2016	1096,50	13,54
September 2016	1086,92	13,39

Sumber: BPS Sumatera Selatan 2017 (diolah)

Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan pada Maret 2009-September 2012 jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan cenderung menurun setiap tahunnya yakni dari 1.167,87 ribu (16,28 persen) Maret 2009 menjadi 1.043,62 ribu (13,48 persen) September 2012. Tetapi pada September 2012-Maret 2013 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yakni dari 1.043,62 ribu orang (13,48 persen) September 2012 menjadi 1.110,53 ribu orang (14,24 persen) Maret 2013. Pada Maret 2013-September 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan kembali mengalami penurunan setiap tahunnya yakni dari 1.110,53 ribu orang (14,24 persen) Maret 2013 menjadi 1.085,80 ribu orang (13,62 persen) September 2014. Tetapi September 2014—Maret 2015 jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat dari 1.085,80 ribu orang (13,62 persen) September 2014 menjadi 1.145,63 ribu (14,25 persen) Maret 2015. Pada Maret 2015-September 2016 jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan kembali mengalami penurunan setiap tahunnya yakni dari 1.145,63 ribu orang (14,25 persen) Maret 2015 menjadi 1.096,50 ribu orang (13,39 persen) September 2016.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa dan pertambahan produksi barang modal. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu, oleh karena itu angka yang digunakan untuk menaksir *output* adalah nilai moneter (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (Sukirno, 2013).

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan (Manurung & Rahardja, 2008). Model klasik tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga kita dapat menulis persamaan,

$$Q = f(K, L, T, U, M, W, I)$$

dimana: Q adalah *output* atau PDB; K adalah barang modal; L adalah tenaga kerja; T adalah teknologi; U adalah uang; M adalah manajemen; W adalah kewirausahaan (*entrepreneurship*); dan I adalah informasi.

Persamaan diatas secara sederhana menunjukkan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013):

a. Barang Modal

Agar ekonomi bertumbuh, stok barang modal harus ditambah. Karena itu, salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi adalah menangi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat investasi. Yang harus diingat adalah pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas.

b. Tenaga Kerja

Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan *output*. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan *output*. hal itu sangat tergantung dari seberapa cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return* (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinergi antara tenaga kerja dan teknologi, penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi.

c. Teknologi

Hampir dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan *output*. Namun, akan ada imbang korban antara kemajuan teknologi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, kemajuan teknologi telah makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya bangsa-bangsa maju (Barat dan Jepang) serta dunia ketiga atau (NSB).

d. Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar *output* yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan *output* yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Uang akan sangat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, selama penggunaannya sangat efisien. Tingkat efisiensi penggunaan uang juga sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan.

e. Manajemen

Manajemen adalah peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern, terutama bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme pasar. Sistem manajemen yang baik, terkadang jauh lebih berguna dibanding barang modal yang banyak, uang yang berlimpah dan teknologi tinggi. Ada perekonomian yang tidak terlalu mengandalkan teknologi yang tinggi, namun berkat manajemen yang baik, mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

f. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Kewirausahaan cukup didefinisikan sebagai kemampuan dan keberanian mengambil resiko guna memperoleh keuntungan. Keberanian itu bukan asal-asalan. Para pengusaha mempunyai perkiraan yang cukup matang bahwa *inputs* yang dikombinasikan akan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, atau menjadi barang dan jasa, yang akan dibutuhkan masyarakat. Kemampuan mengkombinasikan *inputs* ini dapat disebut dengan kemampuan inovasi.

g. Informasi

Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang (*perfect and simetric information*). Kegagalan pasar merupakan akibat tidak terpenuhinya asumsi ini. Tuntutan gerakan reformasi Indonesia berupa transparansi dan kebebasan informasi (pers), dilihat dari teori ekonomi, dapat dibenarkan. Sebab, makin banyak, makin benar dan makin seimbang arus informasi, para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih baik. Alokasi sumber daya ekonomi makin efisien. Dengan sumber daya yang sama, dihasilkan *output* yang lebih banyak. Informasi amat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan tidak lain adalah suatu ceritera (yang logis) mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 2009).

Selanjutnya menurut Manurung & Rahardja (2008) teori-teori pertumbuhan ekonomi melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Perbedaan antara teori yang satu dengan yang lain terletak pada perbedaan fokus pembahasan dan atau asumsi-asumsi yang digunakan.

a. Teori Schumpeter

Menurut Sukirno (2013) Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Didalam mengemukakan teori pertumbuhan Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya (Sukirno, 2013).

b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut Sukirno (2013) teori ini dikembangkan oleh Abraham Movits dan Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

dimana: ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi; ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal; ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk; dan ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi.

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Sukirno, 2013). Selanjutnya menurut Manurung & Rahardja (2008) fokus pembahasan teori pertumbuhan neo-klasik adalah akumulasi stok barang modal dan berkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-asumsi penting dari model Solow antara lain adalah:

- Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi)
- Tingkat depresiasi dianggap konstan
- Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal

- Tidak ada sektor pemerintah
- Tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) juga dianggap konstan
- Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja.

2.2. Teori Inflasi

Menurut Nopirin (2016) inflasi adalah proses kenaikan harga – harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga – harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu. Badan Pusat Statistik (2013) mencatat tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Pasalnya, harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan.

Melalui proses inflasi terus menerus, pemerintah dapat mengambil alih secara rahasia dan tanpa jejak. Dengan cara ini mereka bukan hanya mengambil alih, tetapi mereka mengambil alih secara arbitre dan sementara proses tersebut memiskinkan rakyat banyak. Bila dikaitkan dengan kemiskinan maka ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah (Mankiw, 2003). Secara garis besar teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing menyoroti aspek- aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Ketiga teori inflasi menurut Boediono (2005) dijelaskan sebagai berikut :

a. Teori Kuantitas

Teori ini dikenalkan oleh Irving Fisher, menurut teori ini inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga.

b. Teori Keynes

Dalam teori Keynes, Inflasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang hidup diluar dari batas ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan melebihi jumlah yang telah tersedia. Biasanya masyarakat dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk keinginannya dapat terpenuhi.

c. Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka panjang”. Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, antara lain:

- Ketidak-elastisan penerimaan ekspor.
- Ketidak-elastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri.

2.3. Pengangguran

Menurut Sukirno (2013) terdapat 3 kelompok angkatan kerja berdasarkan Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*), antara lain:

- Menganggur (Unemployed), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan
- Setengah menganggur (Underemployed), yaitu mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh

- Bekerja Penuh (Employed), yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu

Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari tingkat pengangguran terbuka ialah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada (BPS).

2.4. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016), kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Pengertian lainnya kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan. Menurut para ahli Kemiskinan itu bersifat *Multi Dimensional*, Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam – macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijak umum, maka kemiskinan memiliki aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber – sumber keuangan dan informasi. Dimensi – dimensi kemiskinan tersebut ermanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2010).

Ada banyak penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Sharp, et al. (1996) dan Kuncoro (2003) mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu :

- Secara Mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- Kemiskinan timbul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.
- Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

2.5. Hubungan Peretumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan akan ditandai adanya pertumbuhan yang tinggi dengan disertai tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang tinggi pula. Kondisi tersebut akan berlangsung sampai pada titik kritis tertentu, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Subandi, 2011).

2.6. Hubungan Inflasi dan Tingkat Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2013) mencatat tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Pasalnya, harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolak ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah (Mankiw, 2003).

2.7. Hubungan Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan

Arsyad (2010) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Tinjauan literatur mewakili inti teoretis dari sebuah artikel. Pada bagian ini, kita akan membahas tujuan tinjauan literatur. Kami juga akan mempertimbangkan bagaimana seseorang harus mencari literatur yang sesuai yang menjadi dasar tinjauan literatur dan bagaimana informasi ini harus dikelola. Akhirnya, menjawab pertanyaan yang sering dilawan oleh para peneliti pertama kali ketika menyusun tinjauan literatur

3. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data time series periode tahun 2001 – 2016 di Provinsi Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun model yang digunakan sebagai berikut:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 INF + \beta_3 PGR + \varepsilon$$

dimana: KM adalah Tingkat Kemiskinan; β_0 adalah Konstanta; β_1 , β_2 , β_3 adalah Koefisien regresi; PDRB adalah Pertumbuhan Ekonomi; INF adalah Inflasi; PGR adalah Tingkat Pengangguran; ε adalah *error term*.

Agar regresi OLS dapat digunakan untuk alat pengambilan keputusan maka harus dilakukan uji asumsi klasik dan kebaikan model. Kemudian langkah selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis. Metode menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian dan langkah-langkah yang diikuti dalam pelaksanaan penelitian. Sebuah pembenaran singkat untuk metode yang digunakan juga dinyatakan sehingga pembaca dapat mengevaluasi kesesuaian metode, keandalan dan validitas hasil. Studi intervensi yang melibatkan objek atau manusia, dan studi lain memerlukan persetujuan etis harus mencantumkan otoritas yang memberikan persetujuan dan kode persetujuan etika yang sesuai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Asumsi Klasik

4.1.1. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Jarque Barra dengan tingkat alpa 0,05. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Jarque Barra sebesar 1,343643 dengan probability 0,510777. Hal ini menunjukkan bahwa prob > 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

4.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas (Gujarati, 2003). Berdasarkan hasil analisis yang tertera pada tabel 2 diperoleh bahwa semua nilai koefisien korelasi antar variabel bebas memiliki nilai kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

4.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik harus homokedastis oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan uji white. Apabila nilai probability Obs*R-aquared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Obs*R-aquared = 14,67140 dengan

Prob Chi-Squared sebesar 0,1004. Hal ini menunjukkan bahwa prob > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch Godfrey untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi. Apabila nilai probability lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Obs*R-squared sebesar 0,564500 dengan probabilitas *chi-square* sebesar 0,7541, artinya prob > dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

4.1.5. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji Ramsey Reset, dengan melihat nilai probability F hitung harus lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis diperoleh F-statistic sebesar 0,435790 dengan Probability sebesar 0,5216. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probability > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linieritas.

Hasil estimasi model regresi linier berganda dengan menggunakan metode estimasi OLS memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Model OLS

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Constant	12,1235	5,0022	0,0002
PDRB	-1,0452	-2,7305	0,0172
INF	0,3332	2,7764	0,0157
PGR	1,0855	5,0354	0,0002
R ²	0,7964		
DW stat	1,8698		
f-test	16,955		0,0001
Jarque-Bera	1,3436		0,5107
White-test	14,6714		0,1004
Breusch-Godfrey	0,5645		0,7541
Uji Multikolinieritas			
Variabel	PDRB	INF	PGR
PDRB	1.00000	-0.12820	0.03083
NF	-0.12820	1.00000	0.23099
PGR	0.03083	0.23099	1.00000

Sumber: Hasil olah data penulis

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 diperoleh hasil F-Statistic sebesar 16,95502 dengan Prob (F-statistic) sebesar 0,000089. Artinya nilai probability < dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

Secara parsial, nilai konstanta sebesar 12,12345, artinya apabila tidak ada pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran maka tingkat kemiskinan sebesar 12,12345 persen. Selanjutnya, koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -1,045287, artinya apabila pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 1,45% dengan asumsi variabel lain tetap. Tingkat Inflasi sebesar 0,333275, artinya apabila Inflasi meningkat sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,33% dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian pengangguran sebesar 1,085540, artinya apabila pengangguran meningkat sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 1,08% dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil uji parsial yang tertera pada tabel 2 menunjukkan bahwa baik pertumbuhan ekonomi, Inflasi maupun pengangguran memiliki nilai probability $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Sementara itu, koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (uji *goodness of fit*). Berdasarkan hasil analisis diperoleh R-Squared = 0,796446, dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan pengangguran berpengaruh memberikan kontribusi kepada tingkat Kemiskinan sebesar 0,796446 atau 79,64%. Dan sisanya 20,36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara bersama-sama (simultan) pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan selama 2001-2017. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil analisis uji statistik pada F-statistik nilai probability nya lebih kecil dari 0,05.

Secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan selama 2001-2017 secara umum memang selalu mengalami peningkatan hal ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznets (1955), menurut Kuznets pada tahap awal pembangunan akan ditandai adanya pertumbuhan yang tinggi dengan disertai tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang tinggi pula. Kondisi tersebut akan berlangsung sampai pada titik kritis tertentu, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Subandi, 2011).

Inflasi secara parsial juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat inflasi di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh indeks harga konsumen, yang mengalami fluktuasi dari tahun 2001-2017 namun di tahun 2013.2017 tingkat inflasi turun yang menunjukkan daya beli masyarakat meningkat sehingga berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw (2003), Ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan pernah mengalami peningkatan di tahun 2002 namun di tahun 2003 berangsur-angsur turun. Hal ini berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain: (1) pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama 2001-2017 baik secara parsial maupun simultan; (2) besarnya kontribusi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 79,64% sisanya 20,36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi pembangunan*. Edisi 5 .Yogyakarta: STIM YKP
- Boediono. 2005. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Data Inflasi dan Kemiskinan*. Palembang: Badan Pusat Statistik. Diakses melalui laman www.bps.go.id.

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Data Series Sumatera Selatan*. Palembang: Badan Pusat Statistik. Diakses melalui laman www.bps.go.id.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuznets, Simon. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mills, E., & Pernia, E.M. (1994). Introduction and overview. In E.M. Pernia (Ed.), *Urban Poverty in Asia: A Survey of Critical Issues* (pp. 1–51). Hong Kong: Oxford University Press
- Nopirin. 2016. *Ekonomi Moneter*. Buku 2. Yogyakarta: BPFE UGM
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sharp, Ansel, Charles, Register., & Grimes, Paul. 2012. *Economics of Social Issues* (20th Edition). Chicago: McGraw-hill Economics Series.
- Tambunan, Tulus. 2003. *Perekonomian Indonesia: beberapa permasalahan penting*. Bogor: Ghalia Indonesia.